

**HUBUNGAN LUAR NEGERI INDONESIA ERA OTONOMI DAERAH.
Studi Evaluasi Hubungan Sister Province (Provinsi Kembar) Jawa Tengah
Dengan Negara Bagian Queensland Australia Periode Tahun 2000– 2007.**

Reni Windiani

Abstract

Law number 32 / 2004 about Regional Government has open opportunity as an actor in foreign relation. The government of Central Java Province has utilized this opportunity conducting cooperation with government other countries such as Australia, Turkey, China, and Cambodia.

Cooperation between Government of Central Java Province and government from other countries is important to study because this is new phenomenon in foreign relation. An evaluation study is required to know the efficiency and effectiveness of this policy.

This research has focused on the cooperation among sister province that is government of Central Java Province and government of Queensland State of Australia Province for the years 2000 until 2007.

Key words : Sister Province, Foreign Relation, Foreign Cooperation.

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Otonomi Daerah telah membuka peluang keikutsertaan Daerah sebagai salah satu komponen dalam penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri. Peluang Daerah untuk ikut serta berkiprah dalam penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri tertuang jelas pada Undang – undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

Pasal 42 ayat (1c) :

“DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah”;

Pasal 42 ayat (1f) :

“Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah”;

Pasal 42 ayat (1g) :

“Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.”

Pasal 169 ayat (1) :

“Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.”

Pasal 170 ayat (1) :

“Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.”

Wadah yang diberikan oleh UU No. 32/2004 bagi daerah untuk melakukan hubungan dan kerjasama luar negeri, sangat tepat dan sesuai dengan tuntutan jaman, mengingat perkembangan pesat di tingkat nasional dan internasional dewasa ini telah memunculkan subyek non negara (*non-state actor*) sebagai pelaku baru dalam hubungan internasional. Paradigma baru ini telah mengubah pemahaman yang selama ini ada bahwa hubungan luar negeri merupakan monopoli negara (*state actor*).

Pemerintah Daerah sebagai salah satu dari *non-state actor* dalam hubungan internasional, dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk kemajuan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian peluang kesempatan ini sudah semestinya dimanfaatkan dengan sangat bijaksana dengan mengingat pada rambu – rambu yang ada. Berkaitan dengan hal itu Pemerintah Daerah harus memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, di antaranya UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional, Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah memanfaatkan peluang kerjasama ini dengan antara lain: menjalin hubungan dengan Provinsi Siem Reap Kamboja berupa kerjasama menjadikan Candi Borobudur dan Angkor Wat sebagai *sister temple*. (Kompas, 12 Februari 2007); kerjasama *sister province* dengan negara bagian Australia Queensland; kerjasama *sister school* dijalin antara dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah dengan dinas pendidikan Eyub Turki , meliputi SMPN 2 Semarang dengan SMP Tantani Eyub Turki, SMPN 2 Jepara dengan SMP Tantani Eyub Turki, SMPN 1 Salatiga dengan SMP Silahtaraga Eyub Turki, SMPN 2 Kudus dengan SMP Gumussuyu Eyub Turki, dan SMPN 3 Pati dengan SMP Gumussuyu Turki. (http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=22263); kerjasama *sister city* juga telah dilakukan antara Pemerintah Kota Semarang dengan kota Brisbane Queensland Australia pada tahun 1993; dan sekarang ini sedang dijajaki kemungkinan kerjasama *sister city* antara Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Kota Otonom Beihai di Provinsi Guangxi Cina; kerjasama *sister city* antara pemerintah kota Surakarta dengan pemerintah kota Montana, Bulgaria (http://www.deplu.go.id/?hotnews_id=1761).

Kerjasama – kerjasama yang telah dijalin Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah daerah negara – negara lain sebagaimana tersebut di atas, sangat menarik untuk dikaji mengingat fenomena ini masih baru sehingga sangat diperlukan studi evaluasi terhadap kebijakan tersebut, guna mengetahui efektivitas dari kebijakan tersebut. Penelitian ini memfokuskan pada bentuk kerjasama *Sister Province* (Provinsi Kembar) antara Provinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia dengan pertimbangan sebagai berikut : (1) bentuk kerja sama Provinsi Kembar merupakan bentuk kerja sama yang lebih luas dibandingkan dengan bentuk kerja sama lainnya. Kerjasama Provinsi Kembar meliputi meliputi bidang pertanian, bidang ekonomi , bidang pangan dan agribisnis, investasi, pengembangan perkotaan, lingkungan hidup, transportasi dan pariwisata, industri, perdagangan, pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan juga kebudayaan; (2) Kerjasama Provinsi Kembar Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia merupakan kerjasama yang paling lama dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah yaitu telah dimulai dari bulan September tahun 1991.

Beberapa hasil yang telah diperoleh dari kerjasama Provinsi Kembar Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia adalah : Program Pertukaran Profesional Kesehatan antara *Order of the Sisters of Mercy* (Tarekat Suster Belas Kasih) dengan Dinas Kesehatan Provinsi di Jawa Tengah, program tersebut menghasilkan pertukaran dokter dan perawat antara *Brisbane Mater Hospital* dengan Rumah Sakit dr. Kariadi Semarang; Pertukaran guru dan siswa; Pertukaran staff dan perencana pendidikan; *sister school*; penyelenggaraan kelas imersi;

kerjasama Universitas Diponegoro dengan *University of Queensland* (UQ) (<http://www2.kompas.co/kompascetak/0307/24/jateng/452382.htm>); pada tahun 2006 ketika terjadi gempa bumi di wilayah Jawa Tengah, Program Queensland memberikan bantuan berujud program *Livelihood Sustainability Project* (Proyek Penyangga Penghidupan) di empat desa sehingga sebanyak 1000 penduduk memperoleh penghidupannya kembali (http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM07_061.html).

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kerjasama Provinsi Kembar antara Provinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia telah memberikan manfaat positif bagi masyarakat Provinsi Jawa Tengah?
2. Adakah dampak negatif dari kerjasama Provinsi Kembar Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia?
3. Apasajakah faktor penghambat dan faktor pendukung kerjasama Provinsi Kembar Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia?

Dengan perumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk :

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan kerjasama Provinsi Kembar Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia.
2. Mencari dampak positif dan dampak negatif dari hubungan kerjasama Provinsi Kembar Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung kerjasama Provinsi Kembar Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia.

B. PEMBAHASAN

B.1. TINJAUAN PUSTAKA

B.1.a. Politik Luar Negeri

Beberapa pakar hubungan internasional mendefinisikan konsep politik luar negeri sebagai berikut : menurut Jack C. Plano dan Roy Olton dalam Kamus Ilmu Hubungan Internasional, politik luar negeri merupakan “strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional khusus yang dituangkan dalam istilah kepentingan nasional” (Sidik Jatmika, 2001:46); menurut Cecil V. Crabb, Jr. politik luar negeri merupakan hasil penggabungan dari dua unsur yaitu tujuan (kepentingan nasional) dan sarana (kemampuan) dari suatu negara. Jadi dalam politik luar negeri terdapat dua elemen, yaitu tujuan-tujuan nasional (*national objectives*) yang hendak dicapai dan sarana-sarana (*means*) untuk mencapainya. (Columbis dan Wolfe, 1978:87); menurut Modelski politik luar negeri merupakan sistem aktivitas suatu negara untuk mengubah perilaku negara lain, dan untuk mengatur aktivitas negara itu sendiri dalam lingkungan internasional. (Umar Suryadi Bakry. 1999:125).

Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa politik luar negeri adalah kebijakan publik yang berupa aktifitas suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain, dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya di ranah lingkungan internasional.

Menurut Undang – undang Nomor 37 tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 tentang hubungan luar negeri pengertian politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut : Politik Luar Negeri RI adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Definisi ini menunjuk dengan jelas bahwa kewenangan politik luar negeri ada pada Pemerintah Pusat.

B.1.b. Hubungan Luar Negeri

Dalam UU Nomor 37/1999 tentang hubungan luar negeri pada pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.

B.1.c. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional (*national interest*) adalah konsep yang khas dalam studi hubungan internasional. Selama negara-bangsa (*nation-state*) masih merupakan aktor hubungan internasional yang dominan, maka kepentingan nasional merupakan suatu konsep yang selalu digunakan oleh para ahli dalam menganalisa hubungan internasional. Semua ahli agaknya setuju bahwa determinan utama yang menggerakkan negara-negara menjalankan hubungan internasional (politik luar negeri) adalah kepentingan nasional. (Umar Suryadi Bakry. 1999:60).

Menurut K.J. Holsti, kepentingan nasional (*national interest*) dari suatu negara mengacu pada sejumlah perangkat ideal dari tujuan-tujuan nasional suatu bangsa yang harus ditemukan sebagai dasar dari pelaksanaan hubungan luar negeri suatu negara tersebut. Disamping itu kepentingan nasional mengacu kepada sejumlah tujuan nasional suatu bangsa yang akan diraih dalam jangka waktu tertentu. (K.J. Holsty, 1989:176). H.J. Morgenthau mencoba mempersamakan kepentingan nasional dengan *power* yang ingin dicapai suatu negara dalam hubungan internasional. Dengan kata lain, hakekat kepentingan nasional menurut Morgenthau adalah *power* (pengaruh, kekuasaan, dan kekuatan). (Umar Suryadi Bakry. 1999:61). Menurut J. Frankel kepentingan nasional tidak bisa didefinisikan secara sempit dengan cara mengabaikan kepentingan-kepentingan moral, religi, dan kepentingan kemanusiaan yang lain, pendapat ini disetujui pula oleh Nicholas Spykman yaitu bahwa kepentingan nasional mencakup pula kepentingan moral, religi, kebudayaan, dan sebagainya, tetapi untuk mengejar kepentingan-kepentingan itu tetap diperlukan *power* yang mencukupi. (Umar Suryadi Bakry. 1999:61).

Berdasarkan definisi – definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional merupakan sekumpulan konsep-konsep dan nilai-nilai yang normatif dan ideal suatu bangsa yang akan dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa sebagai tujuan nasional yang ingin dicapai dengan didukung oleh keseluruhan kekuatan bangsa yang meliputi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.

B. 1.d. Efektivitas

Stoner dalam (Tangkilisan, 2005:138) menekankan pentingnya efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan – tujuan organisasi, dan efektivitas adalah kunci kesuksesan dari suatu organisasi. Miller dalam (Tangkilisan, 2005:138) mengemukakan bahwa : efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektifitas harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi terutama mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan.

Dapat disimpulkan bahwa konsep tingkat efektivitas organisasi menunjuk pada tingkat seberapa jauh organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi – fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat – alat dan sumber – sumber yang ada. Hal ini berarti bahwa pembicaraan mengenai efektivitas organisasi menyangkut dua aspek yaitu: (1) tujuan organisasi; dan (2) pelaksanaan fungsi atau cara untuk mencapai tujuan tersebut. (Tangkilisan, 2005:140). Dalam penelitian ini perspektif efektivitas organisasi yang digunakan adalah perspektif pelaksanaan fungsi atau cara untuk mencapai tujuan dari organisasi yang ada dalam pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah.

Makna efektivitas selalu terkait dengan tujuan yang hendak dicapai. Steers (1977:5) menjabarkan efektivitas sebagai kapasitas suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber dayanya yang langka dan berharga secara sepandai mungkin dalam usahanya mengejar tujuan operasi dan operasionalnya. Steers,(1985:206) mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi yaitu :

1. Produktivitas;
2. Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas;
3. Kemampuan kerja;
4. Kemampuan berlabar;
5. Pencarian sumber daya.

Sedangkan The Liang Gie (1986:88) memaknai efektivitas sebagai keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek (akibat) yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka perbuatan tersebut dapat dinyatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengertian efektivitas organisasi, tercakup pengertian kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan, program, atau misi) suatu organisasi, produktivitas organisasi, dan tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara anggota organisasi.

Penelitian ini akan melihat efektivitas hubungan kerjasama provinsi kembar (*sister province*) antara Provinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2007.

B.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif dengan tipe penelitian deskriptif. Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan, Dunn (1994:405) mengemukakan lima indikator evaluasi kebijakan sebagai berikut :

Indikator Evaluasi Kebijakan

No.	Kriteria	Penjelasan
1	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?

2	Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
3	Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?
4	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuat kebutuhan, preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
5	Ketepatan	Apakah hasil yang dicapai benar - benar bermanfaat?

Sumber : Dunn (1994:405) dalam Subarsono (2005:126).

Evaluasi terhadap suatu kegiatan adalah penting, karena suatu kegiatan dikatakan berhasil, efektif dan efisien hanya dapat dibuktikan dengan evaluasi, dengan demikian evaluasi haruslah dikembangkan secara melembaga dan membudaya agar pelaksanaan kegiatan, program atau proyek pembangunan dapat berhasil, bermanfaat dan berdaya guna.

B.2.a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara mendalam dengan informan yang berada di : Biro Hubungan Luar Negeri, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, dan BKPM (Badan Kerjasama Penanaman Modal) Jawa Tengah. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu mengumpulkan data tertulis, terutama yang berupa arsip – arsip, dukumen resmi, buku – buku, maupun data – data statistik yang berhubungan dengan penelitian.

B.2.b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer, diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan terpilih.
2. Data Sekunder, diperoleh dari buku – buku, laporan, dokumen – dokumen, jurnal, koran, majalah, dan internet.

B.2.c. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan **Triangulasi**.

B.3. Analisis Data

Proses analisis data kualitatif berlangsung selama dan pasca pengumpulan data. Proses analisis mengalir dari tahap awal hingga tahap penarikan kesimpulan hasil studi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan :

1. **Reduksi data**, yaitu dengan merangkum, memilah-milah data pokok, kemudian memfokuskan dan menyusun data secara sistematis.
2. **Display data**, yaitu dengan menyajikan data tertentu dalam bentuk matriks, grafik, charts, atau network bila diperlukan.
3. **Verifikasi data**, yaitu dengan mencari pola, tema hubungan serta persamaan – persamaan, perbandingan dan kemudian membuat kesimpulan.

Meski demikian, proses analisis tidak menjadi kaku oleh batasan – batasan kronologis tersebut. Komponen – komponen analisis data yang mencakup reduksi

data, display data, dan verifikasi data serta pembuatan kesimpulan, secara interaktif saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data.

B.4. Hasil Penelitian

B.4.a. Sejarah

Sister Province (Provinsi Kembar): yaitu suatu bentuk hubungan kerjasama antar provinsi di suatu negara dengan provinsi di negara lain. Kerjasama Provinsi Kembar antara Provinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia, diawali dengan adanya kebijakan pemerintah Australia pada Negara Bagian Australia untuk melakukan kerjasama dengan Negara Dunia ke Tiga pada tahun 1991.

Negara Bagian Queensland Australia kemudian menjajagi beberapa provinsi yang ada di Indonesia, dengan dukungan dari Bappenas pada tahun 1992 serta persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah ditandatangani kerjasama *Sister Province* (Provinsi Kembar) Provinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia. *Memorandum of Understanding* ditandatangani oleh H.M Ismail selaku Gubernur Jawa Tengah dan Wayne Goss selaku Premier Negara Bagian Queensland Australia.

Menurut keterangan yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan Kasubin. Kerjasama Luar Negeri Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah bapak Ir. Maruli Pakpahan, MSc, kerjasama Provinsi Kembar antara Provinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia tidak didasarkan pada kesamaan – kesamaan kondisi geografis maupun bentuk pemerintahan, tetapi semata-mata hanya karena secara kebetulan Provinsi Jawa Tengah belum memiliki bentuk kerjasama *Sister Province* dengan negara manapun. (hasil wawancara Kamis 20-10-2009 jam 13.00 WIB, lantai 12, gedung A, jln. Pahlawan, Semarang.)

Setelah ditandatangani MoU *Sister Province* Province, pada tahun 1992 dibuka *Queenslad Information Centre* di Badan Penanaman Modal (BPM), dan pada tahun 1993 dibuka *Cetral Java Information Cetre* di Milton Street, Brisbane.

Kerjasama yang dilakukan meliputi bidang : pertanian; pembangunan kota dan desa; perhubungan dan pariwisata; industri; perdagangan dan investasi; pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; serta bidang-bidang yang akan disetujui bersama oleh para pihak. Jangka waktu kerjasama adalah 5 (lima) tahun dan secara otomatis berlanjut untuk 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali apabila terjadi pemutusan secara tertulis oleh salah satu Pihak dalam waktu 6 (enam) bulan sebelumnya.

Adapun sumber pendanaan bagi kegiatan kerjasama *sister province* ini berbeda, bagi negara bagian Queensland sumber dana berasal dari Pemerintah Australia (APBN), sedangkan bagi Provinsi Jawa Tengah pendanaan bersumber dari pemerintah daerah (APBD).

B.4.b. Perkembangan dan Hasil Kerjasama Periode Tahun 1992 - 2000.

Perkembangan dan hasil kerjasama *Sister Province* antara Provinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia dapat dilihat sebagai berikut : (sumber : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2000).

1. Pertanian

a. 1992

Peninjauan obyek-obyek pertanian dan peternakan di Queensland oleh Gubernur KDH Tk. I Jawa Tengah Bp. H.M. Ismail dan DPRD Tk. I Jawa Tengah.

b. 1993

Penandatanganan perjanjian kerjasama teknis pertanian antara Pemda Tk. I Jawa Tengah dengan *Department of Primary Industry* (Wakil Gubernur Soesmono / Menteri *Primary Industry* a.i. the Hon. David Hamill).

c. 1994 Juli

Pembentukan Komisi Peternakan yang terdiri dari :

- 1) Kakanwil Perdagangan Prop. Jawa Tengah
- 2) Ka. Dinas Peternakan Prop. Dati I Jawa Tengah
- 3) Dirut BPD Jawa Tengah
- 4) Ketua BKPM Jawa Tengah

Dengan Program :

- 1) Pengembangan karantina ternak di Cilacap sebagai pelabuhan ternak di Jawa Tengah – Indonesia
- 2) Mengupayakan import bibit sapi dari Queensland untuk penggemukan dengan pola PIR di Cilacap
- 3) Pendirian rumah potong Hewan di daerah Cilacap untuk sasaran ekspor ke Timur Tengah dan Asia Tenggara.
- 4) Mengusulkan program pertukaran staff baik dengan cara mengirimkan atau mendatangkan tenaga ahli dari Queensland dengan sasaran alih teknologi.

d. 1994 September

- 1) Peninjauan dan pembicaraan bersama antara Gubernur KDH Tk. I Jawa Tengah Soewardi dan Komisi peternakan, pendidikan, perhubungan, kerjasama antar daerah pemerintah Queensland di Queensland.
- 2) Pengiriman Sdr. Tugiyono dari Wonogiri peternak teladan nasional dari Jawa Tengah ke Queensland.

e. Nopember

- Pengiriman Dr. John Coulter oleh pemerintah Queensland ke Jawa Tengah/Cilacap untuk mengadakan penelitian lapangan dan penyusunan *business plan* di Jawa Tengah.

f. 1995

- Pengiriman 2 (dua) staf dari Dinas Peternakan Sdri. Ir. Rosana Gabor dan drh. Purwono, ke Queensland untuk selama 3 (tiga) bulan guna mempelajari masalah inseminasi buatan dan manajemen pemasaran atas beaya pemerintah Queensland terkecuali internasional pulang-pergi.

g. Maret

- Kunjungan Menteri Primary Industry of Queensland dan rombongan ke Jawa Tengah.

h. 1995 September

Pemantauan Wakil Gubernur Bidang II Bp. Soesmono bersama-sama dengan DPRD I untuk bidang-bidang pendidikan, peternakan, perdagangan dan turisme.

- Oleh pemerintah Queensland disampaikan bahwa melalui pemerintah Australia telah disalurkan sumbangan ke Indonesia/Bappenas untuk sektor peternakan sebesar US \$ 10 juta per tahun
Diharapkan pemerintah Jawa Tengah menghubungi pemerintah pusat.
- Pengiriman ahli peternakan, Mr. Ian Smith ke Jawa Tengah

- i. 1996
- Dalam peninjauan ke peternakan sapi di Grabag – Magelang, oleh pengimpor sapi dari Queensland (Bp. Edy) diperoleh keterangan bahwa sekarang telah dinikmati L/C yang dibuka setelah 3 (tiga) bulan sapi dari Queensland tiba di pelabuhan tujuan. Saat ini impor sapi melalui pelabuhan Cilacap sebesar 35.000 / per tahun, sebenarnya kapasitas ini dapat meningkat tetapi terbentur quota yang ditetapkan oleh Dirjen Peternakan. Pengiriman ahli peternakan dari Queensland ke Dinas Peternakan Prop. Dati I Jawa Tengah selama 3 bulan (Mr. John Daniel).
- j. 1997
- 1) Quota impor sapi yang ditetapkan oleh Dirjen Peternakan tahun ini sebesar 48.800 ekor.
 - 2) Sampai dengan bulan April 1992 impor sapi dari Queensland melalui pelabuhan Cilacap sudah mencapai 22.357 ekor.
 - 3) Data-data impor sapi melalui Cilacap dari Queensland selalu menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun
- Pemasukkan sapi di Pelabuhan Cilacap dari Queensland (*Feedlotter* Jawa Tengah) :
- a. Tahun 1991 : 2.243 ekor
 - b. Tahun 1992 : 1.181 ekor
 - c. Tahun 1993 : 936 ekor
 - d. Tahun 1994 : 5.501 ekor
 - e. Tahun 1995 : 9.120 ekor
 - f. Tahun 1996 : 35.624 ekor
 - g. Tahun 1997 : 22.357 ekor (s/d bulan April 1997)
- (Sumber : Dinas Peternakan Jateng)

2. Pembangunan Perkotaan & Desa

1993

- Penandatanganan M.O.U sebagai kota kembar antara Pemda Kodya Dati II Semarang dan kota Brisbane pada tanggal 11 Januari .
- Penjajagan kerjasama antara kota Surakarta dan Kota Cairus.
- Pelaksanaan selanjutnya oleh Kodya Dati II Semarang dan Kodya Dati II Surakarta

3. Perdagangan dan industri

a. 1992

- 1) Pembukaan *Queensland Information Centre* di BPKMD Jawa Tengah.
- 2) Kunjungan misi dagang ke masing-masing negara.
- 3) Kerjasama pembangunan rumah potong hewan modern di Salatiga antara PT. Abilowo Jaya Cattle dan EFIC Australia.
- 4) Ekspor Jawa Tengah ke Australia melalui negara bagian Queensland :

1990 - US \$	9,361,64 juta
1991 - US \$	9,020,67 juta

b. 1993

- Pembukaan *Central Java Information Centre*, di Milton Street, Brisbane.
- Penandatanganan kerjasama antara Kadin Jawa Tengah dan *Queensland Industry and Chamber of Commerce*.

1992 - US \$	14,967,79 juta
1993 - US \$	16,712,31 juta

1994 - US \$ 21,212,31 juta

1995 - US \$ 22,500,00 juta

1996 - US \$ 25,731,00 juta

(Sumber : Kanwil. Perdagangan Jawa Tengah)

- Pengiriman misi dagang ke masing-masing negara.

- Impor Jawa Tengah dari Queensland :

1991 - US \$ 1,10 juta

1992 - US \$ 1,38 juta

1993 - US \$ 1,70 juta

1994 - US \$ 3,90 juta

1995 - US \$ 4,50 juta

1996 - US \$ 5,70 juta

(Sumber : Dept. Of Trade and Economic)

c. 1994

- Penandatanganan kontrak pembelian kapas antara PT. Bitratex dan Queensland Cotton sebesar 3,9 juta
- Kunjungan misi dagang Queensland ke Jawa Tengah (bersamaan dengan Governor of Queensland)
- Pembelian 6 (enam) kontainer mebel ukir Jepara dengan PT. Orionindo.

d. 1995

- Konperensi bersama antara I.A.B.C. dan A.I.B.C. (gabungan pengusaha Indonesia – Australia).
- Perjanjian kerjasama peningkatan fasilitas telpon di Jawa Tengah antara Telstra Australia MGTI dan PT. Telkom untuk selama 15 (lima belas) tahun meliputi nilai US \$ 150,000,00
- Pembelian Saham PT. Coca-Cola Indonesia oleh modal Australia.

e. 1996

Maret

- Kunjungan Y.M. Duta Besar Australia ke Jawa Tengah.
- Kedatangan 2 orang tenaga ahli bidang manajemen untuk membantu pengusaha menengah untuk tinggal selama 1 (satu) bulan di Jawa Tengah. 28 – 29 Pebruari

f. 1999

10 (sepuluh) orang pengusaha Queensland dikoordinir oleh Mr. John Quayle (investor yang sudah ada di Semarang / PT.Indoreco - Ceramic Product) melihat-lihat peluang di Jawa Tengah a.l. ke Jepara, Magelang, Solo dan Semarang.

4. Pendidikan dan Iptek

a. 1992

1. Penandatanganan Perjanjian Pendidikan - 1 antara Pemerintah Queensland dan Jawa Tengah.
2. SMU III Negeri Surakarta dengan Smithfields High School.
3. SMU IV Negeri Surakarta dengan Bribble Island High School.

Pengiriman 1 (satu) set gamelan pelog/slendro “Nyai Jatidiri” ke negara bagian Queensland sebagai sumbangan dari Pemda Tingkat I Jawa Tengah untuk lebih memperkenalkan budaya Jawa/ Indonesia di Queensland Australia.

Pameran pendidikan Queensland di Semarang dan Solo

b. 1994

1) Januari

- Pertukaran 5 (lima) orang Guru Bahasa Indonesia / Inggris ke II ke masing-masing propinsi/negara bagian.

2) Juni

- Penandatanganan kerjasama antara Universitas Sebelas Maret (UNS) dengan Central Queensland University.
- Penandatanganan kerjasama antara Universitas Kristen Satya Wacana dengan University of Rockhamto.
- Penandatanganan kerjasama antara Universitas Satya Wacana dengan Lorraine Martin College, Queensland.
- Kerjasama untuk program belajar jarak jauh.
- UKSW diminta menyiapkan bahan-bahan pelajaran bahasa Indonesia dalam CD untuk sekolah-sekolah di Queensland.
- Pertukaran pelajar tingkat SMU sebanyak 10 (sepuluh) orang selama 6 (enam) minggu di masing-masing negara.

c. 1995

1) Januari

- Pertukaran 5 (lima) orang guru bahasa Indonesia / Inggris ke III ke masing-masing negara.

2) Mei

- Penandatanganan kerjasama pendidikan ke III antara Pemda Tk. I Jateng dengan negara bagian Queensland.

Pelatihan 25 (dua puluh lima) guru Queensland pengajar bahasa Indonesia di IKIP Semarang selama 1 (satu) bulan.

3) September

- Tim Evaluasi bidang Pendidikan ke Jawa Tengah terdiri dari :
 - a) Menteri Pendidikan Queensland.
 - b) Ny. Pat Evatt Hamill.
 - c) Ms. Ruben Sullivan, Deputy Director General.
 - d) Mr. Mal Lane, Coordinator, NALSAS.
 - e) Mr. Rob Whiddon.
- Penandatanganan perjanjian pendidikan ke IV antara Pemda Tk. I Jateng dan negara bagian Queensland.

d. 1996

1. Pertukaran 5 (lima) orang guru yang ke III ke masing-masing negara,

2. Pertukaran pelajar SMU ke masing-masing propinsi / negara bagian.

Bantuan I (seperangkat) komputer dari Pemda Tk. I Jawa Tengah ke Persatuan pelajar Indonesia – Queensland.

1) Maret

- Adanya Perubahan politik pemerintah di Australia, kekuasaan berpindah dari partai buruh ke partai koalisi (National/Liberal)
- Tim Evaluasi Pendidikan dari Queensland :
 1. Mr. Mal Lane
 2. Mr. Joan de Graaf
- Mengevaluasi kerjasama bidang pemerintahan di Australia, kekuasaan berpindah dari partai buruh ke partai koalisi (National/Liberal)

2) Juni

- Evaluasi Pendidikan dari Jateng Queensland dan sekaligus menghadiri Joint Conference IABC-AIBC, dipimpin oleh Wagub Bidang II dengan anggota-anggota :
 - a) Ir. Agus Surjono - BKPMJ Jateng.
 - b) Dra. Oerip Lestari - BKPMJ Jateng.
 - c) Rektor IKIP Semarang.
 - d) Drs. Pudjo Kiswanto - Biro Otonomi Daerah Setwilda Tk. I Jateng.
 - e) Susilo, SH - DPRD I Jateng.
 - f) Haryono, BA - DPRD I Jateng.
 - 3) 1996 Oktober
 - Tim Evaluasi Queensland ke Jateng, terdiri dari :
 - a) Mr. Bruce Stewart, manager Indonesia Sekretariat.
 - b) Mr. John Daniels, Director Planning, Dept. Of Primary Industry.
 - c) Mr. Allan Langdon, Director of Education, Dept. of Education.
- e. 1997**
- 1) Januari
 - Mr. Malcom Smith dari University of Griffith mengadakan pembuatan video mengenai kehidupan sekolah-sekolah di Jateng untuk bahan pengajaran bahasa Indonesia di Queensland.
 - 2) April
 - Pengiriman 10 (sepuluh) pelajar-pelajar tingkat SMU dari Queensland untuk selama 6 (enam) minggu berada di Jawa Tengah guna lebih memahami bahasa dan budaya Jawa.
 - Penandatanganan perjanjian pendidikan ke V antara Pemda Tk. I Jateng dan negara bagian Queensland tgl. 7 April 1997.
 - Pertukaran 5 (lima) orang guru yang ke V ke masing-masing negara.
 - Tim Evaluasi Queensland ke Jateng, terdiri dari :
 1. Ms. Ruben Sullivan
 2. Mr. Allan Langdon.
 3. Mr. Mal Lane

Berkunjung ke Jawa Tengah
 - 3) Juni
 - a) 13 Juni 1997 Jamuan Makan Malam untuk menghormati Premier of Queensland beserta Rombongan yang berkunjung ke Jawa Tengah.
 - b) Peresmian Pembukaan Kantor Perwakilan Queensland di Semarang tanggal 14 Juni 1997 oleh Premier of Queensland, The Honourable Robert Borbidge, MLA dan Gubernur KDH Tk. I Jawa Tengah.
 - c) Ikut hadir The Honourable Doug Slack, Minister for Economic Development and Trade and Minister Assisting Premier serta Bapak Widjaja Sugarda, Indonesian Consul General in Sydney.
 - d) 14 Juni 1997 Penandatanganan Memorandum of Understanding Propinsi Kembar antara Jawa Tengah dengan Queensland oleh Premier of Queensland dan Gubernur KDH Tk. I Jawa Tengah.
- f. 1998**
- 1) 8 -10 Januari 1998

Mr. Allan Langdon dan Mr. Col Sutcliffe dari Dept. of Education Queensland berkunjung ke Jawa Tengah.
 - 2) 9 Februari 1998

Pengiriman 3 (tiga) orang Guru Jawa Tengah ke Queensland Australia.
 - 3) 16-24 Feb 1998

Penandatanganan Perjanjian ke VI.

Tim Pendidikan Jawa Tengah ke Queensland untuk memperbaharui Perjanjian Pendidikan Tahun 1998 / 1999 diwakili oleh Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Queensland diwakili oleh Dirjen Pendidikan Queensland di Brisbane.

4) 16 Mei 1998

Guru-guru Queensland kembali ke Australia.

Sehubungan dengan situasi reformasi politik di Indonesia maka Guru-guru Queensland ditarik kembali lebih awal 2 bulan sebelum waktu utgasnya selesai oleh Pemerintah Queensland.

5) Juli 1998

Guru-guru Jawa Tengah yang berada di Queensland atas biaya Pemerintah Queensland diperpanjang masa tugasnya selama 1 tahun dan pada bulan Desember tahun 1998 kembali ke Jawa Tengah untuk liburan selama satu bulan dan juga atas biaya Pemerintah Queensland.

6) Desember 1998

3 orang guru Jawa Tengah : Ibu Hartiti – Bapak Sumadi – Bapak Hasyim berlibur di Jawa Tengah. Biaya tanggungan Pemerintah Queensland.

g. 1999

1) Januari 1999

3 orang guru Jawa Tengah kembali ke Queensland untuk kontrak mengajar Bahasa Indonesia selama 1 (satu) tahun.

2) 23-26 Maret

- Mr. Allan R. Langdon berkunjung ke Jawa Tengah
- MR. ALLAN R. LANGDON, MANAGER LOTE, SOSE, HPE. DEPT. EDUCATION QUEENSLAND berkunjung ke Jawa Tengah dalam rangka menjajagi kemungkinan pelaksanaan Perjanjian Pendidikan untuk tahun 1999/2000 antara Pemda Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia serta peninjauan ke SMU 15 Semarang dan SMU Salatiga.

3) 11-15 Mei 1999

Kunjungan Tim Kesehatan dari Brisbane

Tamu dari **Mater Mother's Hospital Brisbane.**

1. Ms. Jenny Skinner, Director Mate Mother's Hospital

2. Ms. Linda Shields, Staf

Menandatangani kerjasama di bidang Kesehatan antara RS. Mater Mother's Hospital Brisbane dengan RSU Dr. Kariadi Semarang.

Kunjungan ke Kantor Gubernur KDH. Tk. I Jawa Tengah (diterima Wagub II) - RSU Dr. Kariadi - Akper Semarang.

4) Juli-Agustus 1999

- Pengurusan perpanjangan visa, paspor, dan stay permit bagi para guru Jawa Tengah maupun Queensland yang akan melaksanakan program pertukaran.

- Pemerintah Negara Bagian Queensland mengirimkan 5 orang guru ke Jawa Tengah yang ditugaskan untuk mengajar Bahasa Inggris di SMU-SMU Jawa Tengah.

Pemerintah Negara Bagian Queensland menghendaki perpanjangan masa tugas Guru-guru Jawa Tengah yang mengajar Bahasa Indonesia di Queensland untuk jangka waktu satu tahun. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah memberikan ijin serta persetujuan bagi Guru-guru

Jawa Tengah yang ditugaskan di Queensland untuk perpanjangan masa tugas selama satu tahun dengan persyaratan Pemerintah Negara Bagian Queensland Australia bersedia menanggung segala beban biaya yang timbul berkaitan dengan perpanjangan masa tugas guru Jawa Tengah dimaksud.

5) Nop-Des 1999

- Guru-guru Jawa Tengah yang bertugas di Queensland mendapat liburan di Tanah Air Indonesia atas biaya dan tanggungan Pemerintah Queensland selama satu bulan

h. 2000

1) Januari

- Guru Jawa Tengah yang ditugaskan di Queensland kembali ke Australia setelah menjalani masa liburan selama satu bulan di Jawa Tengah guna melanjutkan tugas mengajar Bahasa Indonesia selama satu tahun di Negara Bagian Queensland dengan membawa keluarganya atas biaya pribadi.

2) Pebruari 2000

Seminar tentang Potensi Unggulan Jawa Tengah – Queensland

- Menyenggarakan *Seminar tentang Potensi Unggulan Jawa Tengah – Queensland* yang dilaksanakan pada tanggal 28 Pebruari 2000 bertempat di Hotel Ciputra Semarang.
- Menggalang koordinasi serta persiapan dalam rangka pelaksanaan kunjungan The Honourable Peter Beattle, MLA, Premier of Queensland beserta Rombongan di Jawa Tengah yang menurut rencana dijadualkan pada bulan April 2000.
- Mengkoordinasikan dan mempersiapkan bahan guna pelaksanaan penandatanganan M.O.U. antara Kanwil Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Tengah dengan Yayasan Matter Hospital Queensland

3) April 2000

- Kunjungan The Honourable Peter Beattle, MLA, Premier of Queensland beserta rombongan
- Kunjungan The Honourable Peter Beattlem MLA, Premier of Queensland beserta rombongan di Jawa Tengah dengan jadwal acara sebagai berikut :

4) 6 April 2000

- Pertemuan dengan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah – Bapak Ir. Soesmono Martosiswojo, MBA, MM dan unsur pendidikan dari IKIP Negeri / UNES Semarang dilanjutkan makan malam bersama.

5) 7 April 2000

- Pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah yang diwakilkan kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah Bidang Ekonomi dan Pembangunan – Bapak H. Djoko Sudantoko, S.Sos, MM dilanjutkan dengan penandatanganan M.O.U. antara Kanwil Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Tengah dengan Yayasan matter Hospital Queensland
Seleksi acara penandatanganan M.O.U. dilanjutkan dengan peninjauan Laboratorium Bahasa Inggris di Sronдол, RSU Dr. Kariadi serta peninjauan di wilayah Surakarta.

6) 31 Juli 2000

- Pengiriman seorang guru Jawa Tengah atas permintaan Pemerintah Queensland

- Guru Bahasa Inggris dari SMU I Surakarta (Bpk. Drs. Muh Hasyim) ditugaskan untuk mengajar Bahasa Indonesia di Negara Bagian Queensland Australia atas beban biaya ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Queensland setelah melalui persetujuan Pemda Jawa Tengah dan Kakanwil Depdiknas Propinsi Jawa Tengah dengan biaya.

5. Perhubungan dan Pariwisata

a. 1993

- Pertukaran staf ahli Konservasi dan Pariwisata.
- Kerjasama pengembangan agro wisata Sodong Semarang.

b. 1994

- Pembicara kerjasama bidang perhubungan dan wisata
- Pembentukan komisi perhubungan dan wisata, terdiri :
 1. Ka. Kanwil Perhubungan.
 2. Ka. Dinas LLAJR Ka. Kanwil Parpostel.
 3. Bupati KDH Cilacap.
 4. Direktur Kawasan Industri Cilacap.
 5. Perumpul II Cab. Semarang dan Cilacap.

c. 1995 Mei

Joint Conference IABC-AIBC di Semarang

Bantuan dari pemerintah Queensland untuk melakukan Pre Feasibility Study mengenai pengembangan pelabuhan Cilacap yang dilaksanakan oleh Cornell and Wagner (DR. Charlie Miller).

B.5. Pembahasan

B.5.a. Periode Tahun 1992 - 2000

Kerjasama *Sister Province* (Provinsi Kembar) antara Provinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia periode 1992 hingga tahun 2000 berjalan dengan efektif. Tingkat efektivitas kerjasama ini diukur dari terealisirnya program – program :

1. Program pertukaran staff baik dengan cara mengirimkan atau mendatangkan tenaga ahli dari Queensland dengan sasaran alih terknologi. Program ini terealisir dengan :
 - Pengiriman 2 (dua) staf dari Dinas Peternakan Sdri. Ir. Rosana Gabor dan drh. Purwono, ke Queensland untuk selama 3 (tiga) bulan guna mempelajari masalah inseminasi buatan dan manajemen pemasaran atas beaya pemerintah Queensland pulang-pergi
 - Pengiriman ahli peternakan Mr. Ian Smith ke Jawa Tengah.
 - Pengiriman ahli peternakan dari Queensland Mr. John Daniel, ke Dinas Peternakan Pro. Dati I Jawa Tengah selama 3 (tiga) bulan.
2. Bidang perdagangan dan industri terjadi peningkatan ekspor impor antara Queensland dengan Jawa Tengah sebagaimana data berikut :
 - Ekspor Jawa Tengah ke Australia melalui negara bagian Queensland :

1990 - US \$	9,361,64 juta
1991 - US \$	9,020,67 juta
1992 - US \$	14,967,79 juta
1993 - US \$	16,712,31 juta
1994 - US \$	21,212,31 juta
1995 - US \$	22,500,00 juta

- 1996 - US \$ 25,731,00 juta
(Sumber : Kanwil. Perdagangan Jawa Tengah)
- Ekspor Jawa Tengah ke Australia melalui negara bagian Queensland :
 - 1990 - US \$ 9,361,64 juta
 - 1991 - US \$ 9,020,67 juta
 - 1992 - US \$ 14,967,79 juta
 - 1993 - US \$ 16,712,31 juta
 - 1994 - US \$ 21,212,31 juta
 - 1995 - US \$ 22,500,00 juta
 - 1996 - US \$ 25,731,00 juta
 (Sumber : Kanwil. Perdagangan Jawa Tengah)
 - Impor Jawa Tengah dari Queensland :
 - 1991 - US \$ 1,10 juta
 - 1992 - US \$ 1,38 juta
 - 1993 - US \$ 1,70 juta
 - 1994 - US \$ 3,90 juta
 - 1995 - US \$ 4,50 juta
 - 1996 - US \$ 5,70 juta
 (Sumber : Dept. Of Trade and Economic)

Efektifitas kerjasama di bidang perdagangan dan industri juga dapat dilihat dari

- Penandatanganan kontrak pembelian kapas antara PT. Bitratex dan Queensland Cotton sebesar 3,9 juta
 - Kunjungan misi dagang Queensland ke Jawa Tengah (bersamaan dengan Governor of Queensland)
 - Pembelian 6 (enam) kontainer mebel ukir Jepara dengan PT. Orionindo.
 - Perjanjian kerjasama peningkatan fasilitas telpon di Jawa Tengah antara Telstra Australia MGTI dan PT. Telkom untuk selama 15 (lima belas) tahun meliputi nilai US \$ 150,000,00
 - Pembelian Saham PT. Coca-Cola Indonesia oleh modal Australia.
 - Konperensi bersama antara I.A.B.C. dan A.I.B.C. (gabungan pengusaha Indonesia – Australia).
 - Kedatangan 2 orang tenaga ahli bidang manajemen untuk membantu pengusaha menengah untuk tinggal selama 1 (satu) bulan di Jawa Tengah.
 - Pendirian rumah potong Hewan di daerah Cilacap untuk sasaran ekspor ke Timur Tengah dan Asia Tenggara.
 - Kerjasama pembangunan rumah potong hewan modern di Salatiga antara PT. Abilowo Jaya Cattle dan EFIC Australia.
3. Bidang Pembangunan Perkotaan dan Desa dapat diukur dari terealisirnya Penandatanganan M.O.U sebagai kota kembar antara Pemda Kodya Dati II Semarang dan kota Brisbane pada tanggal 11 Januari dan Penjajagan kerjasama antara kota Surakarta dan Kota Cairus.
 4. Bidang Pendidikan dan Iptek dapat diukur dari terealisirnya program – program sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 di atas.

Dilihat dari hasil pencapaian sebagaimana tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kerjasama *sister province* antara Jawa Tengah dengan negara bagian Queensland Australia periode tahun 1992 – 2000 berjalan efektif. Efektifitas juga dapat dilihat dari tidak terhentinya kerjasama dalam bentuk MoU saja tetapi MoU benar – benar terealisasi di lapangan.

B.5.b. Periode Tahun 2002 – 2007

Kerjasama Sister Province antara Provinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia juga mengalami pasang surut sebagaimana hubungan Indonesia dengan Australia. Peristiwa lepasnya Timor Timur dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdampak negatif terhadap hubungan Indonesia – Australia. Keberpihakan Australia terhadap keinginan Timor Timur untuk lepas dari RI, membangkitkan ketidakpuasan rakyat Indonesia terhadap Pemerintah Australia. Ketidakpuasan ini ditunjukkan salah satunya dengan maraknya demonstrasi – demonstrasi yang memprotes campur tangan Australia dalam urusan Timor Timur.

Demonstrasi juga kerap dilakukan di depan gedung BKPM Provinsi Jawa Tengah dimana gedung tersebut merupakan Queensland Information Centre. Demonstrasi – demonstrasi ini berakibat pada ditutupnya kantor Queensland Information Centre di Jawa Tengah dan kemudian kegiatan dialihkan ke Jakarta di Kedutaan Besar Australia.

Tragedi bom Bali tahun 2003 juga sangat mempengaruhi hubungan Indonesia Australia yang berdampak pula pada kerjasama *Sister Province* Jawa Tengah – Queensland. Peristiwa bom Bali mengakibatkan pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan *travel warning* yaitu kebijakan melarang warga Australia untuk berkunjung ke Indonesia.

Dua peristiwa besar di atas, berpengaruh cukup signifikan terhadap hubungan Indonesia – Australia, yang secara langsung berpengaruh pula pada kerjasama *Sister Province* Jawa Tengah – Queensland. Pada masa atau periode ini kerjasama *Sister Province* Jawa Tengah – Queensland bisa dikatakan dalam kondisi tiarap.

Adapun kerjasama Sister Province Provinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia periode tahun 2002 – 2007 dapat dilihat sebagai berikut :

(sumber : Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, bagian Kerjasama Luar Negeri Provinsi Jawa Tengah).

1. Pertanian (dalam arti luas)

- Leading sektor : dinas peternakan
- Rencana kerjasama : Peningkatan pengetahuan dan alih teknologi penggemukan sapi potong dari Australia
- Realisasi kerjasama : Pembelian sapi potong sebanyak 8 ekor Tahun 2006 ditempatkan di Balai Inseminasi Buatan Sidomulyo Ungaran
- Permasalahan : Karena kerjasama yang dijalin bersifat lepas dan tidak mengikat
- Rencana tindak lanjut : **Kerjasama dengan Queensland masing perlu dilanjutkan** karena Prov. Jawa Tengah masih perlu mengembangkan teknologi peternakan khususnya sapi

2. Pembangunan kota dan desa

- Leading sektor : Badan Pemberdayaan Masyarakat
- Rencana kerjasama : -

Realisasi kerjasama : Tidak melaksanakan kegiatan
Permasalahan : Saat ini Prioritas program adalah penanganan bencana alam dan pemberdayaan masyarakat sehingga kerjasama dengan Queensland belum dilaksanakan
Rencana tindak lanjut : Kerjasama dengan Queensland masih perlu dilanjutkan untuk mempercepat proses alih/transfer teknologi bagi masyarakat (Teknologi Tepat Guna)

3. Perhubungan dan pariwisata

Leading sektor : Dinas Pariwisata

Rencana kerjasama :

- a. Penyelenggaraan incentive tour bagi karyawan usaha pariwisata
- b. Penyusunan paket wisata dan tukar menukar informasi pariwisata Jawa Tengah untuk pasar Queensland
- c. Penyelenggaraan FAM Tour untuk BPW. Penulis Wisata dan wartawan dan Queensland
- d. Partisipasi acara pameran, peristiwa dan pasar wisata di Queensland
- e. Pertukaran pegawai Pemerintah
- f. Bidang Perhubungan

Realisasi kerjasama :

- a. Tidak dilaksanakan
- b. Tidak dilaksanakan
- c. Tidak dilaksanakan
- d. Road Show pelaku usaha pariwisata dalam rangka promosi dan Borobudur International Festival tahun 2002.
- e. Tidak dilaksanakan
- f. Tidak dilaksanakan

Permasalahan :

- a. Adanya kebijakan travel warning dan Pemerintah Federal Australia (terjadinya tragedi bom Bali) tahun 2003 yang melarang warga negaranya berkunjung ke Indonesia
- b. Tidak ada, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dan bukan kegiatan yang kontinyu.
- c. Tidak ada
- d. Tidak ada

Rencana tindak lanjut :

- a. **Kerjasama dengan Queensland masih perlu dilanjutkan** karena promosi pariwisata harus terus digalakkan serta perlunya alih pengetahuan pengembangan keparaeisataan Jawa Tengah yang terpadu dengan pemeliharaan kelestarian lingkungan
- b. **Kerjasama perlu dilanjutkan** karena bidang perhubungan terkait dengan kerjasama sektor lainnya.

4. Industri

a. Leading sektor : Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM

- Rencana kerjasama : Pameran dan pemanfaatan tradecentre Queensland untuk UKM Jateng
- Realisasi kerjasama : Tidak dilaksanakan
- Permasalahan : Tidak ada
- Rencana tindak lanjut : Tidak ada
- b. Leading sektor : Dinas Perindustrian
- Rencana kerjasama :
1. Diklat Penerapan teknologi industri rumah tangga bagi UKM
 2. Pendampingan usaha kepada UKM
- Realisasi kerjasama : Tidak dilaksanakan
- Permasalahan : Tidak ada
- Rencana tindak lanjut :
1. **Kerjasama tidak dilanjutkan** karena pangsa pasarnya kecil
 2. Tidak ada
5. Perdagangan dan Investasi
- a. Leading sektor : Dinas Perdagangan
- Rencana kerjasama :
- Realisasi kerjasama : Tidak melaksanakan kegiatan
- Permasalahan :
1. Ekspor dan impor Prov. Jateng dan Queensland tidak sebanding, eksport lebih kecil dibandingkan impor
 2. Peluang pasar produk Jateng relatif kecil (penduduk Queensland hanya \pm 300 ribu)
- Rencana tindak lanjut : **Kerjasama Bidang perdagangan tidak dilanjutkan** dikarenakan neraca perdagangan tidak seimbang (minus) dan peluang pasar relatif kecil
- b. Leading sektor : BPM
- Rencana kerjasama : Sosialisasi dan pemanfaatan peluang dan investasi di Jawa Tengah
- Realisasi kerjasama : Tidak melaksanakan kegiatan
- Permasalahan : Situasi kondisi keamanan dan sosial politik di Indonesia kurang kondusif
- Rencana tindak lanjut : **Kerjasama Bidang investasi dilanjutkan** dikarenakan saat ini Investor Australia (26 perusahaan) menempati urutan keenam PMA di Jawa Tengah
6. Pendidikan dan kebudayaan
- Leading sektor : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Rencana kerjasama : Pertukaran guru dan Pelajar
- Realisasi kerjasama :
- a. Tahun 2002
1. Jawa Tengah
Pengiriman 8 siswa dan 2 orang guru
 2. Queensland
Pengiriman 8 siswa dan 2 orang guru
- b. Tahun 2003
1. Jawa Tengah

- Pengiriman 8 siswa, 2 orang guru dan 2 orang perencana pendidikan
 - Rintisan program kelas Imersi yang merupakan adopsi dari Queensland
2. Queensland tidak mengirimkan siswa dan guru
- c. Tahun 2004
1. Jawa Tengah
 - Pengiriman 8 siswa, 2 orang guru dan 2 orang perencana pendidikan
 - Pelaksanaan kelas Imersi 12 sekolah (6 SMP dan 6 SMA) di 6 Kab./Kota Jawa Tengah
 2. Queensland
 - Tidak mengirimkan siswa dan guru
 - Secara informal, 1 orang guru (Greg Miller) mengadakan kunjungan ke sekolah Imersi Jawa Tengah.
- d. Tahun 2005
1. Jawa Tengah
 - Pengiriman 4 orang guru
 - Pengembangan kelas Imersi 24 sekolah di 12 Kab./Kota serta 12 sekolah secara swadharma
 2. Queensland
 - Tidak mengirimkan siswa dan guru
 - Secara informal, 1 orang guru (Greg Miller) mengadakan kunjungan ke sekolah Imersi Jawa Tengah.
- e. Tahun 2006
1. Jawa Tengah
 - Pengiriman 4 orang guru
 2. Queensland
 - Tidak mengirimkan siswa dan guru
 - Secara informal, 1 orang guru, 7 orang siswa dan 1 orang tua siswa berkunjung ke Jawa Tengah.

Permasalahan : Adanya kebijakan travel warning dari Pemerintah Federal Australia (terjadinya tragedi bom Bali) tahun 2003 yang melarang warga negaranya berkunjung ke Indonesia sehingga rencana kerjasama antar pemerintah tidak dilaksanakan

Rencana tindak lanjut : **Kerjasama Bidang pendidikan dilanjutkan** dikarenakan adanya manfaat dari kerjasama tersebut, antara lain :

- Peningkatan kualitas guru dan siswa
- Pengembangan program kelas imersi
- Pengembangan sekolah bertaraf Internasional mensyaratkan adanya kerjasama bidang pendidikan dengan LN saat ini Jateng hanya mempunyai kerjasama dengan Queensland

7. Bidang-bidang lain

a. Kesehatan

Leading sektor : Margono Soekardjo

Rencana kerjasama : -

Realisasi kerjasama : Tahun 2004 Pengiriman 2 orang dokter dan 1 orang perawat kesehatan 1 bulan

Permasalahan : Belum menjadi program yang kontinyu

Rencana tindak lanjut : **Kerjasama masih perlu dilanjutkan** karena berdampak positif bagi peningkatan SDM perawat dan dokter

b. SDM aparatur

Leading sektor : Badan Kepegawaian Daerah

Rencana kerjasama : -

Realisasi kerjasama :

- Pengiriman 3 orang SDM Aparatur untuk melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Queensland di Brisbane th 2003
- Pengiriman 8 orang SDM Aparatur untuk short course di Universitas Queensland di Brisbane tahun 2004

Permasalahan : Belum menjadi program yang kontinyu

Rencana tindak lanjut : **Kerjasama masih perlu dilanjutkan** karena berdampak meningkatkan pengetahuan dan wawasan SDM aparatur

Dilihat keterangan tersebut diatas, periode tahun 2002 – 2007 ini dapat dikatakan kerjasama Sister Province antara Provinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia tidak efektif. Ketidakefektifan ini dapat dilihat dari beberapa jenis kerjasama yang tidak dilaksanakan, seperti di bidang Pembangunan Kota dan Desa, Perhubungan dan Pariwisata, Industri, Perdagangan dan Investasi. Pada periode ini bidang atau jenis kerjasama yang berjalan hanya ada pada bidang pendidikan dibawah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Bidang pendidikan dapat berjalan efektif antara lain dikarenakan adanya program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang mensyaratkan kerjasama *Sister School*. Dalam rangka RSBI ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kerjasama Sister School dengan 11 (sebelas) sekolah di Negara Bagian Queensland. (hasil wawancara dengan bapak Susilo Adi , SE. MSi selaku Pinpro Kerjasama Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Kamis 22 Oktober 2009 jam 12.00 WIB, jalan Pemuda Semarang).

Kerjasama bidang pendidikan juga dilakukan oleh Universitas Diponegoro Semarang dengan University of Queensland Australia. Kerjasama dilakukan dibidang penelitian, program double degree antara Magister Ilmu Administrasi Undip dengan The University of Queensland, dan juga kerjasama berupa kursus singkat yang antara lain dilaksanakan oleh empat mahasiswa jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu kelautan (FPIK) Undip. Mahasiswa FPIK ini mendapatkan grant mengikuti kursus singkat Marine Tropical Invertebrate di Center for Marine Studies, University of Queensland, Australia pada bulan Juli-Agustus 2007. Selain itu lima mahasiswa mengikuti kursus singkat mengenai Advance Coral Reef Ecology dan International Conference tentang Coral Reef Management di Heron Island Research Station, Center for Marine Studies, University of Queensland Australia pada bulan Agustus 2005.

B.5.c. Faktor Pendukung

Dari hasil analisis mengenai kerjasama Sister Province antara Provinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia dapat ditemukan faktor yang mendukung kerjasama tersebut. Faktor pendukung antara lain kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat pada Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam

pasal 42 (ayat c), pasal 42 (ayat f), pasal 42 (ayat1g), pasal 169 (ayat 1) dan pasal 170 (ayat 1) Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Faktor pendukung lainnya ialah dilaksanakannya program RSBI di Provinsi Jawa Tengah yang mensyaratkan adanya kerjasama *Sister School* dengan negara lain.

B.5.d. Faktor Penghambat

Ada beberapa faktor penghambat efektivitas kerjasama *Sister Province* antara Provinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia yaitu antara lain :

- a. kurangnya dukungan dana, selama ini kerjasama *Sister Province* untuk Provinsi Jawa Tengah didanai oleh APBD yang jumlahnya kurang memadai. Hal ini mengakibatkan antara lain kantor *Cetral Java Information Centre* tidak dapat berfungsi maksimal akibat tidak ada dana untuk menggaji staf, sehingga *Central Java Information Centre* hanya kadang- kadang ditunggu oleh mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Australia. Akibatnya karena hanya mengandalkan kesukarelaan dari para mahasiswa, maka *Central Java Information Centre* ini tidak dapat berfungsi efektif, penyebabnya antara lain karena para mahasiswa tidak menguasai secara memadai mengenai seluk beluk serta potensi yang ada pada masyarakat dan pemerintah daerah Jawa Tengah. Lain halnya dengan Negara Bagian Queensland yang mendapat dukungan dana dari APBN Pemerintah Australia, mereka dapat membayar staf professional sehingga *Queensland Information Centre* dapat berfungsi dengan baik.
- b. naik turunnya hubungan Indonesia – Australia yang diakibatkan kondisi politik dan ekonomi di kedua negara.

B.5.e. Dampak Negatif

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir tidak ada dampak negatif dari kerjasama *sister province* antara Provinsi Jawa Tengah dengan negara bagian Queensland Australia. Bahkan apabila dilihat dari hasil yang telah dicapai selama ini bentuk kerjasama tersebut sedikit banyak telah menyumbang kemajuan bagi masyarakat Jawa Tengah baik secara kasat mata maupun yang tidak kasat mata (*intangible*). Secara kasat mata dapat dilihat dari hasil kerjasama fisik, adapun yang *intangible* dapat dilihat dari terbentuknya image positif warga Australia terhadap Indonesia.

C. PENUTUP

C.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian tentang kerjasama *Sister Province* antara Provinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia adalah :

1. Kerjasama *Sister Province* periode tahun 1992 – 2000 berjalan efektif.
2. Kerjasama *Sister Province* periode tahun 2000 – 2007 tidak berjalan efektif.
3. Kendala atau hambatan ada pada sumber pendanaan dan fluktuasi naik turunnya hubungan Indonesia – Australia.
4. Faktor pendukung adalah kesempatan yang diberikan pemerintah pusat pada daerah melalui UU Nomor 32 tahun 2004.
5. Tidak ada dampak negatif dari kerjasama *Sister Province* antara Provinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia.

C.2. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang peneliti sampaikan :

1. Diperlukan adanya dukungan dana dari Pemerintah Daerah dengan menambah besaran dana pada APBD di pos kerja sama luar negeri .
2. Perlu dilakukan koordinasi yang baik antara Biro Kerjasama Luar Negeri dengan Dinas – dinas yang menjalin kerjasama dengan Queensland.
3. Kunjungan ke Queensland sebaiknya tidak perlu dilakukan dengan jumlah personil yang besar tetapi cukup dilakukan oleh orang – orang dari dinas yang berkepentingan dan benar – benar memahami visi dan misi kunjungan.
4. Dilakukan evaluasi setiap akhir tahun perjanjian oleh Biro Kerjasama Luar Negeri dan oleh masing – masing Dinas terkait.

DAFTAR RUJUKAN

Buku :

- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Bakry, Suryadi Umar. *Pengantar Hubungan Internasional*, Jakarta: Jayabaya University Press, 1999.
- Columbis A. Theodore dan Wolfe H. James. *Introduction to International Relations, Power and Justice*, New Jersey :Prestice-Hall, Inc., 1978.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Presss, 2003.
- Frankel, J.. *Hubungan Internasional*, Jakarta: Sungguh Bersaudara, 1980.
- Jatmika, Sidik. *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2001.
- Holsti, K.J. *Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis*, Jakarta: Erlangga, 1989.
- Miles & Huberman. *Qualitative Data Analysis; A Sourcebook of New Methods*, Beverly Hills, London: Sage Publications, 1984.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung.: PT. Remaja Rosadakarya, 2007.
- Nugroho, Riant D. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Sumber dari Undang – undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah :

- Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

Lain - lain :

- Kompas, Jakarta, 6 Februari 2001.
- Kompas, Jakarta, 9 Februari 2007
- Kompas, Jakarta, 12 Februari 2007
- http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=22263
- <http://www.suaramerdeka.com/harian/0210/21/khal.htm>
- http://www.deplu.go.id/?hotnews_id=1761
- http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM07_061.html
- <http://www.kesimpulan.co.cc/2009/03/kajian-mengenai-perjanjian-perjanjian-kerjasama.html>
- <http://www2.kompas.co/kompas-cetak/0307/24/jateng/452382.htm>
- http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM07_061.html